



PANCASILA AND PEACE: PERAN INDONESIA DALAM MEDIASI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA; IMPLEMENTASI PANCASILA PADA DIPLOMASI PERDAMAIAN DUNIA

**Pancasila and Peace: Indonesia's Role in Mediation of The Israel-Palestine Conflict;
Implementation of Pancasila in World Peace Diplomacy**

Aulia Pengdaviera Juntami

Politeknik Keuangan Negara STAN
aulia.pengdaviera354@gmail.com

***Abstract.** At the 78th UN General Assembly Session in New York, the Indonesian Minister of Foreign Affairs expressed Indonesia's concern about the condition of the Palestinian people in the Israeli-Palestinian conflict. This speech also emphasized that Indonesia would not stop providing support for the Palestinian people to gain independence. During the conflict, both parties have violated human rights, namely the right to live in safety and other rights. This phenomenon is in stark contrast to the foundation of the Indonesian state, Pancasila. Pancasila, as a national ideology, aspires to justice and prosperity for every individual. In the 1945 Constitution, Indonesia stated that it rejected colonialism and was ready to participate in world order. This commitment is proven by Indonesia's diplomatic activities for world peace. The free and active political system and the Non-Aligned Movement practiced by Indonesia really support Indonesia to become a neutral mediator in regional and international conflicts. This article examines the implementation of Pancasila in world peace, especially in efforts to mediate the Israeli-Palestinian conflict. The research was carried out using qualitative methods with analytical descriptions of data collected using library study techniques. World peace diplomacy based on Pancasila is non-interventionist and respects the sovereignty of other countries. Apart from that, diplomacy based on Pancasila upholds humanity, social justice and the welfare of all people. This is practiced in efforts to mediate the Israeli-Palestinian conflict. Pancasila, with its principles, provides a strong basis for supporting world peace. Indonesia, as a country that upholds Pancasila, has an important role in promoting these values at the international level and contributing to joint efforts to achieve a more peaceful, just and civilized world.*

Keywords; Pancasila, peace diplomacy, Israeli-Palestinian conflict.

ABSTRAK. Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap kondisi masyarakat Palestina pada konflik Israel-Palestina. Pidato tersebut sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti untuk memberikan dukungan bagi masyarakat Palestina untuk merdeka. Selama konflik, kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak hidup dengan



aman dan hak-hak lain. Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan dasar negara Indonesia, Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, mencita-citakan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap individu. Pada UUD 1945, Indonesia menyatakan menolak atas penjajahan atau kolonialisme dan siap ikut serta dalam ketertiban dunia. Komitmen tersebut dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas diplomasi Indonesia untuk perdamaian dunia. Sistem politik bebas aktif dan Gerakan Non-Blok yang dipraktikan Indonesia sangat mendukung Indonesia untuk menjadi mediator yang netral pada konflik regional dan internasional. Artikel ini meneliti mengenai implementasi Pancasila dalam perdamaian dunia terutama pada upaya mediasi konflik Israel-Palestina. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan deskripsi analitik pada data yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Diplomasi perdamaian dunia yang berdasar Pancasila bersifat non-intervensi dan menghormati kedaulatan negara lain. Selain itu, diplomasi berdasar Pancasila menjunjung kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Hal tersebut dipraktekkan dalam upaya mediasi konflik Israel-Palestina. Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya memberikan dasar yang kuat dalam mendukung perdamaian dunia. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila, memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai ini di tingkat internasional dan berkontribusi pada usaha bersama untuk mencapai dunia yang lebih damai, adil, dan beradab.

Kata kunci; Pancasila, diplomasi perdamaian, konflik israel-palestina.

1. Pendahuluan

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Amerika Serikat. Pidato ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan di dunia. Dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim, konflik regional, dan isu-isu kemanusiaan, Indonesia berusaha untuk memainkan peran penting dalam upaya mencapai solusi-solusi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu bentuk komitmen dukungan perdamaian yang diberikan Indonesia adalah hak kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Indonesia telah lama mendukung hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri. Peran Indonesia dalam tugas perdamaian Palestina mencakup sejumlah inisiatif dan upaya, diantaranya melalui diplomasi dan advokasi. Indonesia telah secara konsisten



berperan sebagai advokat untuk hak-hak rakyat Palestina. Ini mencakup dukungan untuk pengakuan internasional Negara Palestina dan kampanye diplomatik di forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga aktif dalam organisasi-organisasi internasional untuk mendukung hak kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara. Pada KTT Asia-Afrika 2015, forum ini berhasil menghasilkan deklarasi khusus yang membahas dukungan kepada Palestina. Selain itu, dialog mengenai keprihatinan dan perkembangan konflik Palestina juga disampaikan pada International Conference on the Question of Jerusalem 2015 dan UN Civil Society Forum on the Question of Palestine 2015 yang diselenggarakan PBB atas kerja sama dengan OKI dan Pemri di Jakarta.

Pendekatan lain dilakukan dalam upaya menciptakan perdamaian antar dua negara tersebut yaitu melalui kerja sama regional dan bilateral. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan seluruh dunia dalam mendukung perdamaian di Palestina. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Palestina dan Israel. Meskipun hubungan diplomasi antara Indonesia-Israel memiliki tantangan dan sensitivitas tertentu. Namun, upaya-upaya untuk menjalin kerjasama positif dalam bidang-bidang yang dapat berkontribusi pada perdamaian harus tetap menjadi tujuan yang dikejar oleh kedua negara.

Selain melalui diplomasi dan mediasi, Indonesia juga banyak memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terkena dampak konflik. Indonesia tidak kendor dalam memberikan bantuan pokok seperti beras, gandum, obat-obatan, dan peralatan medis yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina. Dalam situasi konflik yang berkelanjutan, bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang seringkali menghadapi kesulitan akses ke makanan dan layanan kesehatan. Indonesia juga telah memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur penting di Palestina. Ini mencakup proyek-proyek untuk membangun atau merekonstruksi rumah sakit, sekolah, pusat kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palestina. Dalam situasi



konflik yang berkelanjutan, bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Palestina yang terdampak perang.

Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sipil merupakan prioritas utama dalam tugas perdamaian Indonesia. Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di kedua belah pihak. Korban yang paling terpukul adalah rakyat biasa terutama rakyat Palestina. Konflik ini telah mengakibatkan pelanggaran hak dasar yaitu hak hidup dalam damai dan aman dan hak untuk tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang. Serangan udara, serangan darat, pengepungan, dan blokade telah menjadi karakteristik konflik ini, mengakibatkan banyak korban di antara populasi sipil. Hingga saat ini, korban konflik Palestina-Israel dikabarkan telah mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka di kedua belah pihak.

Israel telah menduduki sebagian besar wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Dalam prosesnya, terjadi perampasan tanah secara sistematis, pembongkaran rumah, dan pemukiman ilegal Israel di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, Israel juga sering memblokir ekonomi terhadap Jalur Gaza dan pembatasan bergerak di Tepi Barat. Ini mengakibatkan isolasi dan ketidakmampuan rakyat Palestina untuk mengakses layanan dasar seperti bantuan makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi akibat konflik Israel-Palestina sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Pada sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencita-citakan perdamaian dunia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi alasan negara Indonesia mempromosikan keadilan dan kedamaian dalam upaya menyelesaikan konflik regional dan internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut: Bagaimana peran Pancasila dalam diplomasi perdamaian dunia? Bagaimana nilai Pancasila diimplementasikan dalam upaya mediasi konflik Israel-Palestina?



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Diploması Indonesia pada Konflik Israel-Palestina

Dengan eskalasi konflik Israel-Palestina, pihak lain harus hadir untuk membantu proses perdamaian. Untuk melibatkan Pemerintah Indonesia dalam konflik Israel-Palestina, kedua belah pihak harus berkolaborasi. Ikatan kepercayaan adalah hubungan yang harus ada antara Indonesia dan Israel, serta antara Indonesia dan Palestina. Jika hubungan kepercayaan ada antara Israel dan Palestina, proses perdamaian dan penyelesaian konflik akan lebih mudah. Namun, kedua negara tidak memiliki hubungan kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memulai proses perdamaian dan terlibat di dalamnya, pemerintah Indonesia harus memiliki hubungan kepercayaan dengan semua pihak. (Sumertha et al., 2017)

Selama bertahun-tahun, Indonesia dan Palestina telah menjalin kepercayaan satu sama lain, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang. Selain itu, pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan politik dan moral kepada rakyat Palestina dalam berbagai kesempatan untuk mendukung kemerdekaan dan perjuangan mereka. Ini adalah bukti kepercayaan yang sudah ada antara keduanya. Bantuan dari pemerintah Indonesia dapat dikirim secara langsung. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan, politik, dan penguatan kapasitas diberikan kepada Palestina secara langsung dan hampir tanpa hambatan. Bantuan kemanusiaan dapat dengan mudah didistribusikan dan dikomunikasikan sebagai reaksi cepat terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di Palestina. Selain itu, melalui kerangka CEAPAD, NASSP, dan KSST, negara lain seperti Jepang terus mengundang bantuan untuk meningkatkan kapasitas untuk persiapan kemerdekaan Palestina. (Sumertha et al., 2017)

Pemerintah Indonesia juga sering mendukung Palestina melalui organisasi internasional dan gerakan. Pemerintah Indonesia terus mengajak negara-negara anggota PBB, OKI, GNB, dan ASEAN melalui jalur diplomasi untuk terus mengingat dan memperhatikan apa yang terjadi di Palestina. Pemerintah Indonesia tidak hanya



memberikan perhatian, tetapi juga sering mendorong negara lain untuk melakukan hal-hal nyata untuk membantu mengakhiri penjajahan di Palestina. Tujuan pemerintah Indonesia, yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk menghapus penjajahan global dan menjaga ketertiban global. (Sumertha et al., 2017)

Pemerintah Indonesia juga sering mendukung Palestina melalui organisasi internasional dan gerakan. Pemerintah Indonesia terus mengajak negara-negara anggota PBB, OKI, GNB, dan ASEAN melalui jalur diplomasi untuk terus mengingat dan memperhatikan apa yang terjadi di Palestina. Pemerintah Indonesia tidak hanya memberikan perhatian, tetapi juga sering mendorong negara lain untuk melakukan hal-hal nyata untuk membantu mengakhiri penjajahan di Palestina. Tujuan pemerintah Indonesia, yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk menghapus penjajahan global dan menjaga ketertiban global. (Sumertha et al., 2017)

Penguatan dukungan Indonesia untuk kapasitas Palestina melalui peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) adalah salah satu contoh nyata dukungan Indonesia untuk Palestina. Sebagai kolaborasi antara Komite Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Inalien Orang Palestina dan Komite Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga menjadi tuan rumah Pertemuan Luar Biasa OKI ke-5 pada 6-7 Maret 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian konflik Israel-Palestina yang belum selesai. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019a).

Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina, pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, pembuatan lampu, dan pertanian senilai 1,5 juta dolar, dan bantuan untuk pembangunan Pusat Jantung Indonesia di rumah sakit As-Shifa di Gaza. Antara tahun 2009 dan 2014, Indonesia juga aktif memberikan bantuan kepada Badan

Bantuan dan Kerja Internasional untuk Pengungsi Palestina. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019a).

Indonesia, disampaikan oleh menteri luar negeri, menyampaikan bagaimana posisi Indonesia dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia t.t.), yaitu:

1. Mendukung solusi dua negara (Israel dan Palestina), yang didasarkan pada hukum internasional dan HAM, dan yang melibatkan kedua belah pihak parameter yang telah ditetapkan dalam beberapa resolusi PBB.
2. Menekankan bahwa masyarakat internasional harus memiliki sikap berimbang (imparsial) dalam membantu penyelesaian masalah Palestina dan mendorong proses perdamaian.
3. Mendukung pentingnya menjaga keberlangsungan kerja UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi Palestina, serta ikut menyerukan perlunya keterlibatan masyarakat internasional dalam membantu para pengungsi Palestina, terutama dalam menjamin masa depan anak anak.
4. Indonesia secara konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

2.2 Pancasila dan Hak Asasi Manusia

Nilai dasar, juga dikenal sebagai nilai ideal Pancasila, adalah nilai-nilai yang relatif tetap (tidak berubah) yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai ini bersifat universal dan mencakup nilai-nilai yang baik dan benar. Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang bagaimana Pancasila berhubungan dengan hak asasi manusia. (Syarbaini,2003:32).

1. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak setiap orang untuk menganut agama mereka sendiri, melakukan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.



2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.
3. Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa ada unsur yang menyatukan warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan terlihat dalam kehidupan pemerintahan, negara, dan masyarakat demokratis.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengakui hak milik dan jaminan sosial yang dilindungi oleh pemerintah, serta hak untuk pekerjaan dan perlindungan sosial. (Astuti,2015; Cesara, 2018)

2.3 Diploması Kemanusiaan

Indonesia memiliki beberapa komponen penting dalam menjalankan politik internasionalnya, salah satunya adalah diplomasi kemanusiaan. Ini harus dilaksanakan dan dikembangkan dengan mengutamakan nilai tambahan (Suratiningsih et al., 2020), yaitu:

1. prinsip perlindungan HAM bagi masyarakat yang terkena krisis;
2. prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam pemberian bantuan;
3. prinsip bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat terkena dampak; serta
4. penghormatan terhadap integritas nasional dan kedaulatan negara yang menghadapi krisis. Melalui pendekatan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terbangun 'trust' dari negara dan masyarakat penerima bantuan dari Indonesia. Selanjutnya diharapkan dengan adanya bantuan kemanusiaan Indonesia dapat berkontribusi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di negara yang terkena dampak krisis dan bencana (Kemlu, 2019).



3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018). Menurut Sugiyono (2017) Studi pustaka merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian pula akan semakin kredibel apabila didukung foto – foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada.

Desain penelitian yang akan digunakan adalah desain penelitian deskriptif analitis. metode deskriptif analitis menurut Sugiyono (2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Pancasila dalam Diploması Perdamaian Dunia.

Pancasila, sebagai ideologi dasar Indonesia, memiliki nilai-nilai yang mendasari kedamaian, keadilan, dan kerjasama antarnegara. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Pancasila menjadi landasan yang kuat untuk mendukung perdamaian dunia. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah jalur diplomasi. Diplomasi yang berdasarkan pada Pancasila dapat diterapkan untuk mendorong perdamaian dunia dan berkontribusi terhadap stabilitas global.



Diplomasi berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan menghormati kedaulatan negara lain. Hal ini memastikan bahwa konflik internasional didekati dengan komitmen penyelesaian damai dan bukan melalui agresi atau campur tangan. Komitmen ini ditunjukkan melalui sistem politik luar negeri bebas aktif milik Indonesia. Negara aktif berpartisipasi dalam urusan internasional dan regional namun tidak terlibat dalam agresi militer atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Indonesia juga merupakan anggota Gerakan Non-Blok dan ASEAN yang mendorong Kerjasama, dialog, dan perdamaian antar negara. Selain itu, Indonesia, sebagai negara yang menganut Pancasila, telah menandatangani Persetujuan Konvensi Pelarangan Senjata Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT) dan mendukung upaya global untuk mengurangi senjata nuklir dan mencegah penyebaran senjata ini.

Meskipun tidak campur tangan dalam konflik, Indonesia tetap berperan dalam mediasi konflik. Indonesia sebagai pendukung diplomasi Pancasila dapat menjadi mediator netral dalam konflik internasional. Indonesia dapat terlibat aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, mendukung upaya diplomasi multilateral yang bertujuan untuk mencegah konflik dan mendorong resolusi damai. Hal ini dapat membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, bertujuan untuk penyelesaian damai dan menghindari konfrontasi militer. Beberapa konflik yang berhasil di mediasi Indonesia adalah Konflik Aceh (1976-2005). Melalui proses negosiasi yang dilakukan di bawah mediasi Indonesia, konflik Aceh akhirnya diakhiri dengan perjanjian damai pada tahun 2005. Peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Aceh diakui secara internasional sebagai pencapaian yang signifikan dalam menjaga perdamaian. Selain itu, Indonesia telah mendukung upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, meskipun tidak secara langsung sebagai mediator. Namun, Indonesia aktif dalam diplomasi dan hubungan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan perdamaian di Timur Tengah.



Diplomasi berdasarkan Pancasila sangat menekankan pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Hal ini selaras dengan Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sikap ini juga tercermin pada cara diplomasi Indonesia. Dalam melakukan diplomasi, Indonesia mengakui kesamaan derajat, hak, dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Sehingga jalannya kerjasama dan negosiasi dapat dilaksanakan dengan netral dan objektif. Melalui sila kedua, Pancasila dapat memandu upaya Indonesia untuk mempromosikan inisiatif kemanusiaan secara global. Hal ini termasuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menjadi sumber konflik. Konflik tidak hanya bersumber dari masalah sosial tetapi juga masalah lingkungan dan sumber daya alam. Melalui cerminan sila kelima diplomasi berdasarkan Pancasila dapat mengadvokasi kebijakan lingkungan yang bertanggung jawab untuk memitigasi konflik lingkungan dan mendorong kerja sama internasional dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya. Sehingga kedamaian dan kesejahteraan rakyat dapat terealisasikan.

Prinsip-prinsip Pancasila tentang kesatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap berbagai budaya dapat digunakan untuk mendorong pertukaran budaya dan saling pengertian antar bangsa. Peningkatan pemahaman budaya dapat membantu mengurangi ketegangan dan mendorong perdamaian. Pemahaman akan perbedaan budaya mampu membantu menghindari stereotip dan prasangka akibat perbedaan cara berpikir dan pandangan satu pihak dengan pihak lain. Pemahaman budaya adalah unsur penting dalam diplomasi yang efektif. Ini membantu menciptakan hubungan diplomatik yang kuat, menghindari konflik, dan mempromosikan kerjasama dan perdamaian di tingkat internasional.

Komitmen Indonesia terhadap diplomasi berlandaskan Pancasila untuk perdamaian dunia melibatkan keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional, penyelesaian konflik, dan upaya mengatasi akar penyebab konflik global. Dengan menjunjung tinggi prinsip



Pancasila, Indonesia dapat berperan positif dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di kancah internasional.

4.2 Implementasi Nilai Pancasila dalam Upaya Mediasi Konflik Israel-Palestina.

Cita-cita bangsa Indonesia, "Ikut melaksanakan ketertiban dunia", tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah berkontribusi pada ketertiban dan perdamaian dunia. Pada alinea pertama pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan", Indonesia menolak adanya penjajahan kolonialisme. Bentuk penolakan tersebut diwujudkan dengan misi perdamaian dan upaya diplomasi internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional.

Pancasila sebagai dasar negara adalah cerminan dari sikap dan tindakan Indonesia untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Pada konflik Israel-Palestina, Indonesia secara konsisten memberikan bantuan material kepada masyarakat sipil korban konflik. Selain itu, Indonesia juga secara continue menyuarakan hak asasi manusia dan hak kemerdekaan Palestina di meja runding internasional. Bantuan yang diberikan mampu mengurangi dampak buruk dan beban penderitaan masyarakat dari konflik. Diplomasi perdamaian yang terus digalakan untuk kemerdekaan Palestina diharapkan mampu menarik simpatisan negara-negara lain sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan konflik pelik ini. Dukungan yang diberikan tidak terlepas pada sikap rasa kemanusiaan yang tercermin pada sila kedua Pancasila.

Bantuan-bantuan yang diberikan Indonesia tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat Indonesia. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, sikap gotong royong, persatuan, dan toleransi menjadi semangat masyarakat Indonesia untuk menolong rakyat Palestina yang terdampak konflik. Banyak badan amal yang membuka donasi umum



untuk masyarakat Palestina. Bantuan yang diberikan tidak terbatas pada barang tetapi juga banyak relawan yang menyumbangkan tenaganya untuk membantu masyarakat Palestina menghadapi krisis.

Diplomasi Indonesia di forum internasional selaras dengan Pancasila sila keempat, yaitu menyelesaikan konflik dengan mengutamakan musyawarah atau negosiasi dibanding perang dan kekerasan. Indonesia secara konsisten terus menyuarakan hak kemerdekaan Palestina dan mengingatkan tentang peliknya pelanggaran hak asasi manusia di berbagai forum. Upaya juga terus digalakkan melalui organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan KTT. Meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat, hal ini tidak menciutkan suara Indonesia untuk memediasi konflik Israel-Palestina.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan atas tindakan Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia. Salah satunya, Indonesia aktif menjadi mediator untuk konflik Israel-Palestina. Konflik pelik ini terus di singgung dan disuarakan di rapat-rapat internasional terutama membahas masalah pelanggaran hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Konflik Israel-Palestina adalah konflik panjang yang memiliki akar sejarah, agama, politik, dan sosial yang kompleks, dan telah menyebabkan ketegangan dan kekerasan yang berkepanjangan di Timur Tengah. Konflik ini telah berdampak besar pada warga sipil, termasuk pengungsi Palestina dan korban konflik. Masalah kemanusiaan, seperti akses terhadap air, makanan, dan layanan kesehatan, adalah perhatian serius dalam konflik Israel-Palestina. Konflik ini telah mempraktekkan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai Pancasila terutama Pancasila sila kedua yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Indonesia dengan ideologi Pancasila menolak adanya penjajahan dan ketidakadilan. Dalam praktiknya, Indonesia banyak memberikan bantuan material dan nonmaterial kepada



masyarakat Palestina yang terdampak. Selain itu, Indonesia juga aktif pada diplomasi perdamaian di forum-forum internasional. Sistem politik bebas aktif dan Gerakan Non-Blok sangat mendukung Indonesia sebagai negara netral yang mampu menjadi mediator di konflik regional dan internasional.

Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya yang mendorong persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas, memberikan dasar yang kuat dalam mendukung perdamaian dunia. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila, memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai ini di tingkat internasional dan berkontribusi pada usaha bersama untuk mencapai dunia yang lebih damai, adil, dan beradab. Pancasila bukan hanya ideologi Indonesia, tetapi juga pesan perdamaian global yang sangat relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230924093044-134-1002960/menlu-retno-saat-pidato-di-sidang-pbb-ri-tak-mundur-dukung-palestina> diakses pada 22 Oktober 2023 pukul 17.00
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231020191447-4-482444/13-update-baru-gaza-korban-tewas-5500-tank-israel-mendekat> diakses pada 22 Oktober 2023 pukul 18.30
- <https://ugm.ac.id/id/berita/konflik-palestina-israel-kembali-memanas-indonesia-konsisten-dukung-palestina/> diakses pada 21 Oktober 2023 pukul 15.00
- <https://kemlu.go.id/portal/id/read/511/berita/regional-conference-on-humanitarianassistance-upaya-kongkrit-kepemimpinan-diplomasi-kemanusiaan-indonesia-dikawasan>, pada 22 Oktober 2023 pukul 07.00
- https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isupalestina. diakses pada 21 Oktober 2023 pukul 08.00
- <https://kemlu.go.id/portal/id/read/251/berita/indonesia-serukanpenghentian-pembangunan-pemukiman-ilegal-israel-di-palestina>. diakses pada 22 Oktober 2023 pukul 11.00



- Cesara, D. F. (2018). Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–241.
- Sumertha, I. G., Ismadi, A., & Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan*, 3(1), 1–28.
- Suratiningsih, D., Pupita, D., & Safira, S. (2020). Diplomasi Perdamaian Dan Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*), 25(1), 11. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i1.2602>
- Syarbaini, Syahrial. (2003). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. (2015). Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Pandecta Volume 10 Nomor 2*, hlm 185-198.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.